Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, September 2024, 10 (18), 605-617
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13932587
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Dasar

Makmur Syukri[1], Sri Melisawati[2] , Desi Fatma[3], Reni Renanda[4]

[1]Uin Sumatera Utara, Medan, Indonesia
[2,3,4] Uin Mahmud Yunus, Batusangkar, Indonesia

Received: 04 September 2024
Revised: 11 September 2024
Accepted: 25 September 2024

Abstract

The aim of this article is to examine the impact of education financing management on the quality of elementary schools, providing new insights into financing management. The research method applied in this research is a literature study, where data is obtained through analysis of literature and references related to this research topic. The research results show that the implementation of financing management in elementary schools can increase efficiency and effectiveness in planning and budget preparation, administration and reporting of budget funds. Therefore, educational unit leaders need to have a deep understanding of financial management, ensuring the smooth running of the organization.

Keywords: *Financing Management, Education, Quality of Primary Schools*

(*) Corresponding Author: makmursyukri@uinsu.ac.id, srimelisawati15@admin.sd.belajar.id, desifatma52@dinas.belajar.id, renirenanda38@dinas.belajar.id

How to Cite: Syukri, M., Melisawati, S., Fatma, D., & Renanda, R. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(18), 605-617. https://doi.org/10.5281/zenodo.13932587.

PENDAHULUAN

Biaya pendidikan memegang peran sentral dalam penyelenggaraan suatu lembaga pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai. Manajemen anggaran pendidikan yang efektif menjadi kunci utama untuk mencapai standar mutu yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengelolaan optimal terhadap anggaran pendidikan guna memastikan tercapainya tujuan mutu sekolah.

Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tujuan utama, yakni mencapai tingkat mutu sekolah yang diharapkan. Keberhasilan visi dan misi sekolah dapat direalisasikan apabila setiap tahapan dalam manajemen pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa aspek krusial dalam tahapan manajemen pembiayaan pendidikan mencakup perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan. Melalui pendekatan ini, diharapkan terwujudnya pengelolaan keuangan pendidikan yang berdaya guna dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang optimal.

Setiap aspek kegiatan di sekolah, mulai dari perencanaan program, sosialisasi, penyediaan sarana prasarana, pelaksanaan program, hingga supervisi dan evaluasi, memerlukan alokasi biaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor keuangan memegang peran krusial sebagai salah satu elemen utama dalam menjamin kesuksesan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah. Pembiayaan yang diperuntukkan merupakan elemen kunci dalam mendorong terwujudnya semua program yang telah direncanakan, menjadi pendorong utama

untuk kelancaran dan keberhasilan setiap tahap kegiatan pendidikan. (Munir, 2013). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan standar pembiayaan pendidikan merupakan sebuah analisis atas sumber-sumber pendapatan dan anggaran penggunaan keuangan yang berfungsi sebagai pengelolaan pendidikan agar efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada rencana kerja sekolah sehingga sekolah dapat menghasilkan mutu layanan pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (Nurkamiden & Anwar, 2023).

Pendidikan dasar formal di Indonesia di mulai dari sekolah dasar. Oleh karena itu peningkatan mutu layanan pendidikan bagi peserta didik sekolah dasar merupakan hal yang sangat penting. Standar pelayanan minimum bidang pendidikan terus diupayakan berpihak kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami dan menghayati tujuan pendidikan terutama dalam pembentukan karakter siswa menuju kedewasaan. Usaha untuk menjadikan pendidikan sekolah dasar dengan tuntunan mutu layanan terbaik juga harus ditinjau dengan pengelolaan keuangan yang baik pula (Nasution & Hasan, 2021). Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan dasar dan menengah terdapat 8 standar yaitu a) standar mutu lulusan, b) standar isi, c) standar proses, d) standar penilaian, e)standar pendidikan dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana, f) standar pengelolaan dan h) standar pembiayaan. Seluruh standar tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindak lanjut untuk mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu. Standar pembiayaan merupakan salah satu standar yang harus dicapai dengan pengelolaan administrasi lembaga yang tertib dan teratur (Anisa et al., 2020)

Ada tiga tugas pokok kepala sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yaitu manajerial, kewirausahaan dan supervisi pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas kepala sekolah dalam manajerial salah satunya adalah manajemen pembiayaan pendidikan. Langkah awal dalam perencanaan manajemen pembiayaan adalah menyusun perencanaan program selama 4 tahun ke depan yaitu Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang dibuatkan berdasarkan rekomendasi rapor pendidikan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk platform rapor pendidikan. Selanjutnya, RKJM dijabarkan menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat rancangan program sekolah dalam setahun. Pembiayaan yang dianggarkan dalam RKT dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang pada saat ini telah dimudahkan dengan adanya aplikasi ARKAS 4.0. Kemampuan kepala sekolah dalam memahami pembuatan RKJM, RKT dan RKAS akan sangat berpengaruh pada tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah dasar yang telah ditetapkan (Ekowati et al., 2020). Kemampuan lembaga dalam merancang perencanaan menjadi elemen kunci untuk mencapai manajemen pembiayaan yang tepat sasaran. Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan sangat bergantung pada kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola dana dengan mengutamakan kebutuhan pokok dan mengikuti skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkelanjutan, sejalan dengan rencana program. Untuk mencapai hal ini, koordinasi antara berbagai unsur di lembaga pendidikan

diperlukan agar dapat efektif mengelola dana dan merumuskan langkah-langkah strategis, menciptakan manajemen pembiayaan yang berkualitas.

Banyak permasalahan pada tingkat sekolah dasar yang terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan seperti sumber dana yang terbatas, banyak program yang tidak dapat dianggarkan, kegiatan yang dianggarkan tidak sesuai dengan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan yang telah dituangkan dalam rencana kerja sekolah, kekurangan sumber daya manusia yang mampu dan mumpuni dalam pengelolaan keuangan sekolah serta kurangnya kerjasama antara stakeholders yang ada di sekolah dasar. Di satu sisi sekolah dasar perlu pengelolaan keuangan yang baik, sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai penyimpangan yang dapat merugikan pendidikan.

Anggaran yang terbatas mengharuskan seluruh warga sekolah untuk lebih kreatif, menangkap peluang yang ada, menjalin kerjasama dan kolaborasi serta mengelola anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya. Artikel ini akan mengupas tahapan dasar manajemen pembiayaan pendidikan yang perlu diperhatikan oleh pengelola anggaran sekolah sehingga dapat menjadi tambahan referensi dalam manajemen pembiayaan sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan. Data-data yang ada dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur berupa artikel yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Data penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan teoritis dan filosofis.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk merumuskan konsep atau teori yang menjadi dasar dari suatu penelitian. Tinjauan pustaka, sebagai bagian dari penelitian akademik, memiliki tujuan utama dalam mengembangkan aspek teoritis dan praktis. Dengan menerapkan metode penelitian ini, penulis dapat secara efisien mengatasi permasalahan yang akan diinvestigasi. (Nurkamiden & Anwar, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dasar

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber dana pendidikan yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan layanan pendidikan. Manajemen keuangan pada satuan pendidikan merupakan kegiatan pengaturan keuangan yang meliputi pengkajian sumber dana, peruntukan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai usaha mencapai visi misi dan tujuan satuan pendidikan (Nurkamiden & Anwar, 2023)

Tujuan dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah memastikan ketersediaan dan penggunaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai standar pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, manajemen pembiayaan mencakup kegiatan pencatatan, pelaksanaan, serta pengawasan atau pelaporan dana keuangan. Manajemen pembiayaan pendidikan mencakup segala aspek terkait

penataan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di institusi pendidikan. Penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan merupakan tiga aspek kunci dalam kegiatan manajemen pembiayaan. Jika tiga aspek ini dilaksanakan dengan profesional, manajemen keuangan pendidikan dapat beroperasi secara efektif dan efisien, mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dicky Perwira Ompusunggu & Nina Irenetia (2023) menguraikan bahwa manajemen keuangan dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan dalam rangka mengelola sumber daya keuangan suatu lembaga dengan efektif dan efisien. Tiga aspek utama dalam fungsi manajemen keuangan mencakup perencanaan keuangan, pengendalian keuangan, dan pengambilan keputusan keuangan. Proses perencanaan keuangan melibatkan pengembangan tujuan keuangan jangka panjang dan perancangan rencana untuk mencapainya. Saat merencanakan keuangan, lembaga perlu mempertimbangkan sumber daya finansial yang tersedia, termasuk sumber dana, biaya-biaya, dan arus kas.

Pengendalian keuangan melibatkan manajemen anggaran, pengelolaan risiko, dan kontrol biaya. Fokusnya adalah memastikan bahwa lembaga dapat mengikuti rencana keuangan yang telah ditetapkan, mengurangi risiko keuangan, dan meningkatkan kinerja keuangan. Pemantauan kinerja keuangan secara berkala dan pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dengan rencana keuangan merupakan aspek penting dalam pengendalian keuangan.

Dalam konteks ini, Dicky Perwira Ompusunggu & Nina Irenetia menekankan bahwa lembaga harus secara teratur memonitor kinerja keuangannya dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja keuangan jika terjadi ketidaksesuaian dengan rencana keuangan yang telah ditetapkan.

Di era digitalisasi saat ini, manajemen keuangan pendidikan yang efektif dan efisien semakin menjadi fokus utama bagi lembaga pendidikan. Untuk meraih tujuan keuangan jangka panjang, lembaga pendidikan perlu mengelola sumber daya keuangannya dengan teliti, mengenali sumber dana yang tersedia, mengelola risiko, dan melakukan evaluasi keuangan dengan seksama. Dengan melaksanakan manajemen keuangan secara optimal, lembaga pendidikan dapat menjamin pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah, meningkatkan nilai layanan pendidikan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya keuangan yang ada..(Dicky Perwira Ompusunggu & Nina Irenetia, 2023).

Empat prinsip yang mendasari pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Suksesnya manajemen keuangan lembaga pendidikan dapat diukur melalui implementasi keempat prinsip ini. Oleh karena itu, sekolah harus merancang langkah-langkah yang cermat dalam mengelola anggaran pendidikan, memastikan pemberian pelayanan pendidikan terbaik kepada peserta didik.

Prinsip keadilan dalam manajemen pembiayaan pendidikan menuntut terciptanya keseimbangan yang adil antara kepentingan individu dan masyarakat. Ini tercermin dalam perancangan anggaran yang ditempatkan secara merata untuk kepentingan seluruh anggota komunitas sekolah. Sebaliknya, prinsip efisiensi dapat dilihat dari perbandingan optimal antara input (masukan) dan output (hasil),

serta antara upaya dan pencapaian. Fokusnya mencakup tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang diinvestasikan. (Nur Khomisah Pohan & Hellen Tiara, 2022).

Pada tingkat satuan pendidikan, manajemen keuangan yang transparan mencakup penyediaan informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Semua sumber keuangan, jumlah dana yang tersedia, rincian anggaran yang digunakan, laporan audit, dan pemantauan anggaran harus tersaji secara jelas bagi masyarakat. Sekolah bertanggung jawab untuk mempublikasikan semua dokumen pendukung yang berkaitan dengan penggunaan dana anggaran sebagai bagian dari kewajiban dalam mengelola program dan anggaran.

Dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh sekolah, seperti realisasi penggunaan dana dari berbagai sumber finansial dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana, harus disajikan secara terbuka. Papan informasi yang mencakup penggunaan anggaran dapat dijadikan salah satu media publikasi laporan dana, ditempatkan di lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Melalui transparansi pengelolaan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan dukungan dari berbagai pihak seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pelaksanaan program satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan tersebut. Kepercayaan terhadap sekolah dapat tumbuh, dan semua pihak yang berkepentingan dapat menaruh harapan pada satuan pendidikan yang menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas. Memberikan informasi yang cukup dan mudah diakses oleh semua pihak, serta menyajikan data yang akurat, mampu membangun kepercayaan yang saling menguntungkan antara pihak satuan pendidikan dan masyarakat.

Prinsip akuntabilitas berarti mulai perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan seluruh tata kelola keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Pihak satuan pendidikan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Ada tiga komponen utama penting dalam menjaga akuntabilitas manajemen keuangan pendidikan dasar yaitu yang pertama, adanya keterbukaan pihak sekolah dalam menerima masukan dan saran serta melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sekolah, yang kedua, satuan pendidikan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga setiap tugas, fungsi dan wewenang yang dilaksanakan dapat terukur dengan jelas hasil kinerjanya dan yang ketiga, adalah adanya peran aktif dari semua pemangku kepentingan untuk saling mendukung terciptanya suasana yang menunjang agar terciptanya standar pelayanan minimum pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Budgeting (Penyusunan Anggaran)

Dalam setiap kegiatan diperlukan perencanaan, karena dengan adanya perencanaan setiap tujuan yang hendak dicapai dapat dilakukan dengan efektif, efisien dengan memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga tidak ada hal yang tersia-sia terutama pada proses perencanaan pembiayaan (Dhori et al., 2022). Tahapan pertama dalam manajemen pembiayaan pendidikan adalah Budgeting (penyusunan anggaran). Budgeting (penyusunan anggaran) adalah rancangan strategis dalam bentuk angka-angka dan satuan uang dan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan semua program yang telah dibuat oleh satuan pendidikan dalam dokumen 1 selama satu tahun. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan

biasanya membuat rancangan anggaran untuk kebutuhan sekolahnya biasanya dilakukan pada jangka waktu tertentu. Penyusunan anggaran pada satuan pendidikan seringkali dirancang untuk satu tahun anggaran. Anggaran untuk tahun selanjutnya dirancang di akhir tahun anggaran berjalan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan anggaran dimulai setelah ada program sekolah yang direncanakan untuk tahun anggaran dan telah diperhitungkan besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan melakukan rancangan anggaran, semua kegiatan sekolah dapat dikendalikan dengan lebih efektif dan efisien.

Rapor pendidikan di satuan pendidikan saat ini menjadi salah satu pedoman dalam merancang RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang diperoleh melalui permintaan dari komunitas sekolah. Proses penyusunan RKAS dilakukan secara logis dan valid untuk meyakinkan dan memberikan akurasi, sehingga membangun kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa.

Adapun langkah-langkah efektif dan efisien dalam penyusunan RKAS melibatkan pemahaman terhadap semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama satu tahun ke depan. Program kegiatan tersebut kemudian diorganisir berdasarkan jenis dan tingkat prioritas. Selanjutnya, dilakukan perhitungan jumlah, harga satuan, dan kebutuhan dana untuk setiap jenis kegiatan. Seluruh data keuangan ini kemudian diinput ke dalam format standar RKAS, dalam hal ini ARKAS 4.0.

Sebagai langkah tambahan, penting untuk mempelajari juknis BOSP sebagai acuan yang akurat, membantu memandu implementasi penganggaran yang telah disusun. Meskipun proses ini dapat dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di satuan pendidikan, terutama dalam konteks sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Meski demikian, perlu diakui bahwa mewujudkan prosedur manajemen keuangan yang ideal tetap menghadapi berbagai tantangan.

Sumber keuangan pendidikan merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan saat melakukan rancangan pembiayaan. Pada satuan pendidikan dasar ada tiga sumber keuangan yaitu a) pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan (seperti BOSP reguler dan BOS kinerja) ; b) orang tua atau peserta didik; c) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Agar visi misi dan tujuan satuan pendidikan tercapai, satuan pendidikan perlu melakukan penyusunan rencana anggaran yang diawali dari kegiatan merencanakan sumber dana yang dapat diperoleh sehingga dapat menjalankan program dan kegiatan pendidikan. Ginanjar & Purwanto, 2022 menjelaskan bahwa rancangan rencana anggaran biasanya berhubungan dengan biaya (budget) yang dikeluarkan guna melaksanakan tujuan satuan pendidikan, semua program dan kegiatan dianalisis dan diuraikan kedalam bentuk biaya. Tahapan dalam melakukan pengelolaan anggaran yaitu a) perencanaan anggaran, b) mempersiapkan anggaran, c) pengelolaan pembiayaan anggaran, d) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Rancangan perencanaan keuangan satuan pendidikan dasar harus memperhatikan hal-hal berikut, seperti: 1) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah harus berpedoman pada petunjuk teknis Bantuan

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2) Melakukan analisis rapor pendidikan dengan membaca dan memahami rekomendasi yang disediakan dalam rapor pendidikan satuan pendidikan, Identifikasi Refleksi dan Benahi (IRB) 3) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran sekolah dan hasil evaluasi dapat dijadikan rekomendasi untuk rancangan rencana kerja dan anggaran sekolah dimasa yang akan datang.

Penyusunan anggaran pendidikan adalah proses perencanaan, alokasi, dan pengendalian sumber daya keuangan yang akan digunakan untuk mendukung sistem pendidikan. Anggaran pendidikan memainkan peran penting dalam mengelola dana dan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyusunan anggaran pendidikan:

1. Perencanaan Anggaran:

Tentukan visi, misi dan tujuan pendidikan: Tentukan tujuan dan target yang ingin dicapai dengan menggunakan anggaran pendidikan. Ini dapat mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan peralatan, dan lain-lain.

Identifikasi sumber daya: Identifikasi sumber daya keuangan yang akan digunakan untuk mendukung pendidikan, termasuk anggaran pemerintah, dana donasi, atau sumber daya lainnya.

Tinjau kebijakan dan pedoman: Periksa kebijakan dan pedoman terkait anggaran pendidikan yang berlaku di tingkat nasional, regional, atau lokal.

2. Alokasi Dana:

Alokasikan dana sesuai dengan prioritas: Tentukan alokasi dana untuk berbagai program, proyek, atau kegiatan pendidikan sesuai dengan prioritas dan tujuan pendidikan. Prioritaskan area-area yang memerlukan perhatian khusus.

Perhitungan biaya: Hitung biaya yang diperlukan untuk setiap program atau proyek pendidikan, termasuk biaya operasional, gaji guru, perbaikan fasilitas, dan lain-lain.

3. Penyusunan Anggaran:

Buat rencana anggaran: Susun rencana anggaran yang mencakup estimasi pengeluaran dan penerimaan untuk tahun anggaran tertentu. Buat rincian anggaran untuk setiap program atau proyek pendidikan.

Berikan fleksibilitas: Pastikan anggaran memiliki fleksibilitas untuk menangani perubahan yang mungkin terjadi selama tahun anggaran. Pertimbangkan perubahan situasi yang tidak terduga.

Penyusunan anggaran pendidikan merupakan alat penting dalam memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini juga membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Langkah awal dalam melaksanakan perencanaan keuangan dan pembiayaan di satuan pendidikan dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil rapor pendidikan. Setelah itu, dilakukan rapat yang membahas tujuan strategis dalam rentang waktu tertentu, seperti jangka pendek, menengah, dan panjang (RKJM dan RKT). Pihak sekolah kemudian mengadakan rapat bersama untuk menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), yang melibatkan pihak

sekolah, komite sekolah, dan orangtua siswa. Rapat bersama membahas secara komprehensif mengenai kontinuitas semua kegiatan pembiayaan yang telah diatur dalam RKAS, memberikan gambaran mengenai pendapatan dan pengeluaran atau belanja sekolah dalam jangka waktu tertentu, seperti jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan anggaran belanja sekolah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan hasil rapat. Proporsi biaya dibagikan untuk kebutuhan sekolah, seperti sarana dan prasarana, pengembangan SDM guru, honor GTT, biaya perawatan sekolah, pembelian bahan habis pakai, peningkatan akademik siswa, dan kebutuhan lain yang terkait dengan proses belajar mengajar di kelas.

2. Accounting (Pembukuan)

Peningkatan mutu sekolah dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen pembiayaan di pendidikan dasar. Dengan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik sehingga pendidikan dasar dapat mencapai visi misi dan tujuan sekolah. Oleh karena itu manajemen pembiayaan pendidikan perlu dikelola dengan sangat baik. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dasar. Beberapa tahapan tersebut meliputi perencanaan anggaran satuan pendidikan pelaksanaan pembiayaan dan pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sekolah dan evaluasi serta pengawasan pengelolaan anggaran biaya pendidikan dasar. Salah satu langkah lanjutan dari perencanaan pembiayaan adalah kegiatan pembukuan atau accounting. Kegiatan pembukuan atau accounting ini memerlukan sumber daya manusia yang kompeten karena pembukuan ini meliputi beberapa hal seperti kebijakan dalam menerima atau mengeluarkan uang serta wewenang dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran uang satuan pendidikan. Di satuan pendidikan dasar biasanya ada tiga orang pengelola keuangan sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab pengelola keuangan, Kedua adalah bendaharawan sebagai pihak yang melakukan penerimaan dan pengeluaran biaya-biaya yang dilakukan melalui transfer antar bank, dan yang ketiga adalah pengelola keuangan yang berperan dalam melakukan pembukuan atau accounting Melalui aplikasi anggaran rencana kerja sekolah Atau yang disebut dengan ARKAS, Dan pada saat ini pendidikan dasar menggunakan aplikasi ARKAS 4.0 yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan riset dan teknologi. ARKAS 4.0 ini sangat memudahkan dalam melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Beberapa prinsip pengelolaan pembiayaan satuan pendidikan yaitu transparan, efisien dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009. Manajemen keuangan sekolah yang menggunakan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel dapat mencegah timbulnya masalah-masalah keuangan seperti dana sekolah yang digunakan tidak sesuai dengan rencana anggaran sekolah, adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di satuan pendidikan, dana anggaran sekolah yang tidak mencukupi dan merangkum semua kegiatan sekolah yang telah direncanakan sebelumnya, serta menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara seluruh pemangku kepentingan. Prinsip akuntabilitas keuangan pada manajemen pembiayaan pendidikan dasar dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang akurat dan merangkum semua biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahun anggaran tersebut kepada semua stakeholder pendidikan. Sehingga semua pihak

dapat mengetahui dengan jelas tentang pengelolaan dana di satuan pendidikan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi yang bersifat terbuka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.(Ekowati et al., 2020)

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Bagi satuan pendidikan, beragam manfaat yang dapat dirasakan dengan menggunakan ARKAS antara lain:

1) Membuat perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dana BOSP secara lebih efisien
2) Dapat melakukan Perubahan dan Pergeseran perencanaan anggaran dana BOSP secara lebih mudah
3) Dapat melaporkan hasil realisasi belanja dari perencanaan anggaran dana BOSP secara lebih mudah
4) Mempercepat proses pelaporan penggunaan dana BOSP secara efisien dan efektif.
5) Sudah terintegrasi dengan Dapodik, dan akan terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi seperti Rapor Pendidikan dan SIPLah. Kedepannya, ARKAS juga akan terintegrasi dengan SIPD yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Manajemen ARKAS (MARKAS)
6) Memastikan pelaporan yang dibuat sesuai dengan pengaturan di daerah karena format laporan ARKAS sudah merujuk pada Permendagri 24/2020.

Setelah dirilis pada episode ke-16 Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) terus melakukan pembaruan terhadap Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk mendukung penerapan tata kelola satuan pendidikan yang unggul. Melalui platform ARKAS, kepala sekolah dan dinas pendidikan dapat merancang, menganggarkan, dan melaporkan penggunaan dana BOS secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi dalam satu aplikasi yang menyeluruh. Iwan Syahril menyampaikan bahwa ARKAS, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri nomor 907-6479-SJ dan Mendikbud Ristek No 7 tahun 2021, telah ditetapkan sebagai satu-satunya aplikasi pengelolaan dana BOSP dan akan diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.

Platform ARKAS 4 membawa tiga prinsip kemudahan, yaitu praktis, nyaman, dan aman. Kemudahan praktis terwujud melalui nilai sisa dana anggaran yang diambil secara otomatis dan integrasi penuh dengan aplikasi SIPlah. Dari segi kenyamanan, ARKAS 4 memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dengan penghitungan pajak SIPlah yang otomatis, dan akses yang lebih mudah. Keamanan menjadi fokus utama ARKAS 4, dengan adanya notifikasi kesalahan saat pengisian data dan dilengkapi panduan pengisian untuk

memastikan keakuratan. Semua perbaikan fitur ini tetap mengikuti regulasi Permendagri No 3 tahun 2023 mengenai Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah.

3. Auditing (Pemeriksaan)

Pemeriksaan atau Auditing adalah kegiatan yang merupakan pertanggungjawaban Kepala sekolah bendahara, dan operator keuangan terhadap pengelolaan keuangan satuan pendidikan yang meliputi kegiatan penerimaan dana Bantuan Operasional satuan pendidikan (BOSP) dari pemerintah pusat, pembayaran atau pentransferan semua biaya-biaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada saat pelaksanaan audit atau pemeriksaan, dibutuhkan standar operasional prosedur (SOP) atau kriteria-kriteria tertentu yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi-informasi yang bisa diverifikasi. Informasi tentang pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan harus dapat diukur sehingga informasi tersebut dapat diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Pemeriksaan (audit) memiliki beberapa bentuk seperti pemeriksaan (audit) laporan keuangan, pemeriksaan (audit) operasional, pemeriksaan (audit) ketaatan.

Pertama pemeriksaan (audit) laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen penilaian terhadap sebuah laporan keuangan, apakah informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat diukur dan diverifikasi serta format penyajian laporan telah memenuhi standar dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Audit laporan keuangan biasanya lebih efisien karena hanya membutuhkan satu auditor dalam pelaksanaan dan dalam membuat kesimpulan hasil dari audit laporan keuangan lebih dapat dipertanggungjawabkan, hal ini lebih baik daripada memberikannya kepada beberapa pihak yang melakukan audit secara individu. Pemeriksaan (audit) yang kedua adalah pemeriksaan (audit) operasional. pemeriksaan operasional adalah pemeriksaan terhadap efisiensi dan efektivitas terhadap sebuah prosedur atau pelaksanaan program-program pada satuan pendidikan sehingga di akhir pemeriksaan (audit), seorang auditor biasanya akan memberikan masukan-masukan dan saran-saran kepada pimpinan atau kepala sekolah sehingga dapat memperbaiki layanan pendidikan di satuan pendidikan. Ketiga adalah pemeriksaan (audit) ketaatan. Pemeriksaan (audit) ketaatan berperan untuk mengevaluasi apakah seorang pimpinan atau manajer telah mengikuti petunjuk teknis (juknis) atau peraturan-peraturan atau prosedur prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemeriksaan ketaatan pada satuan pendidikan dasar juga mencakup apakah penanggung jawab pengelolaan keuangan telah mengikuti aturan atau standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh yayasan Terutama untuk satuan pendidikan swasta seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan pesantren-pesantren. Contohnya peninjauan standar biaya umum (SBU), pemeriksaan perjanjian dengan pihak lain (mitra kerja, pihak perbankan atau para kreditor).

Pelaksanaan pemeriksaan (audit) berperan sebagai sarana yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap semua kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan pada satuan pendidikan dasar. langkah langkah dalam melakukan audit ada 4, yaitu audit pendahuluan, review, audit lanjutan dan pelaporan. Pertama, audit pendahuluan biasanya terkait

dengan interpretasi atas laporan keuangan yang diberikan oleh satuan pendidikan dasar kepada tim auditor termasuk di dalamnya analisis kesesuaian dengan petunjuk teknis (juknis) dan peraturan-peraturan yang ditetapkan selanjutnya juga berisi beberapa kriteria awal dalam pemeriksaan (audit). Kedua adalah ulasan pada pengendalian sistem internal, laporan keuangan yang dipresentasikan terlihat baik apabila sistem yang berjalan di satuan pendidikan sudah bagus ataupun sebaliknya apabila sistemnya tidak baik maka laporan keuangan tersebut perlu diperiksa lebih mendalam. Ketiga yaitu audit lanjutan, pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menilai dan memeriksa setiap bukti transaksi seperti kuitansi dan dokumentasi pada setiap transaksi yang dilakukan. Keempat adalah pelaporan. Pelaporan disini dimaksudkan sebagai hasil temuan oleh auditor, di dalamnya juga berisi masukan-masukan dan saran-saran.

Dalam pemeriksaan (audit) mengacu kepada hukum, peraturan, dan undang-undang serta petunjuk teknis yang berlaku karena setiap audit harus memiliki sistem pengendalian. Sistem pengendalian pada audit merupakan sistem keuangan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti Standar operasional pembiayaan, standar operasional pembukuan, standar operasional pembelian modal dan jasa, standar operasional penggunaan sip lah dan standar operasional lainnya termasuk juga Pernyataan standar akuntansi keuangan 45 (standar PSAK 45) yang membahas mengenai pencatatan laporan keuangan organisasi/entitas nirlaba. Seorang auditor harus memahami tentang pengelolaan keuangan pendidikan dasar sehingga auditor dapat merencanakan dan melaksanakan audit terhadap pengelolaan keuangan satuan pendidikan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pemeriksaan (audit) sebaiknya dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan terutama pada pendidikan dasar

Pemeriksaan (audit) dapat dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Auditor internal biasanya dilakukan oleh tim auditor dari satuan pendidikan ataupun tim auditor dari dinas pendidikan, sedangkan auditor eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah ditugaskan oleh pemerintah. Laporan oleh auditor dibuat pada kertas kerja audit (KKA) yang berisi kesimpulan, hasil temuan, dan rekomendasi untuk satuan pendidikan yang di audit. Laporan ini sebagai sebuah bukti kinerja dan pertanggungjawaban tim auditor yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

SIMPULAN

Pengelolaan keuangan di satuan pendidikan dasar memiliki tujuan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan. Manajemen pembiayaan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas yang berpegang pada hukum dan aturan serta petunjuk teknis yang terkait. Beberapa hal yang penting dilakukan dalam manajemen pembiayaan pendidikan dasar adalah memberikan layanan semua informasi tentang anggaran yang digunakan di satuan pendidikan, bekerja sama dan berkolaborasi dengan stakeholder dalam setiap merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan anggaran satuan pendidikan, membuat laporan pengelolaan keuangan satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan dengan terbuka, berupaya membangun tim manajemen pembiayaan

dan selalu meningkatkan kompetensi yang bertugas merancang anggaran, melaksanakan pembiayaan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan dan program-program yang terkait dengan peserta didik.

Peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai apabila pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan terlaksana dengan baik sehingga dapat mendukung berlangsungnya pelaksanaan program yang ditetapkan sekolah. Penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang telah ditetapkan merupakan faktor kunci tercapainya pelayanan pendidikan yang optimal.

Mutu pendidikan dasar memiliki korelasi yang signifikan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, di mana kemampuan manajemen pembiayaan dapat membentuk rencana program dan kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Melalui manajemen pembiayaan yang efektif, proses pembelajaran di kelas dapat ditingkatkan, inovasi dan produk unggulan sekolah dapat berkembang, prestasi sekolah dapat dicapai, baik dalam hal prestasi akademik maupun non-akademik siswa. Selain itu, penilaian dan evaluasi yang terencana dengan baik juga dapat mendukung terbentuknya lulusan berkualitas.

REFERENSI

Anisa, N., Furqorina, R., Gonadi, L., & Wulandari, R. T. (2020). Pelatihan Pembukuan Keuangan untuk Pengelola Lembaga PAUD. *Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2). https://doi.org/10.17977/um050v3i2p136-139

Dhori, M., Aflah, N., Siswadi, S., & Lessy, Z. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam Upaya Peningkatan Mutu. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, *8*(1). https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.603

Dicky Perwira Ompusunggu, & Nina Irenetia. (2023). Pentingnya Manajemen Keuangan Bagi Perusahaan. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, *3*(2). https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1129

Ekowati, E. T., Sunandar, S., & Murniati, N. A. N. (2020). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR ISLAM AR RAHMAH KECAMATAN SURUH. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, *8*(1). https://doi.org/10.26877/jmp.v8i1.5368

Ginanjar, M. H., & Purwanto, E. (2022). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Informatika Bina Generasi 3 Kabupaten Bogor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *5*(01). https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2024

Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *At-Ta'dib*, *8*(2). https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502

Nasution, N., & Hasan, M. A. (2021). IBM APLIKASI KEUANGAN PADA SEKOLAH DASAR LUHURING BUDI KECAMATAN RUMBAI. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(3). https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.3492

Nur Khomisah Pohan, & Hellen Tiara. (2022). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan (Tamwil) Dalam Perspektif Islam. *Southeast Asian Journal of*

Islamic Education Management, *3*(1). https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i1.90

Nurkamiden, U. Dj., & Anwar, H. (2023). KONSEP MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *11*(1). https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i1.3384

Solehan, S. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1). https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046